



**POLITIK IDENTITAS KIAI  
(STUDI KASUS DI DESA KALANGANYAR SEDATI SIDOARJO)**

**Oleh:** Ach. Faisol

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: [faisol.ach1964@gmail.com](mailto:faisol.ach1964@gmail.com)

---

Diterima: 21-11-2019 | Direvisi: 30 November 2019 | Disetujui: 12 Desember 2019  
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

---

**Abstrak**

*Ada kesan bahwa politik identitas muncul dari minoritas yang ditindas baik oleh negara terhadap negara lain, negara melawan rakyatnya sendiri, komunitas warga negara terhadap komunitas lain dari sesama warga negara, pengikut agama tertentu dengan pengikut agama lain, dan seterusnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah politik identitas dapat muncul dari mayoritas. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati, bertemu face to face, berteman, dan bergaul selama bertahun-tahun dari 1995 hingga 2019. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa politik identitas dapat muncul dari mayoritas. Politik identitas tidak selalu datang dari minoritas; Politik identitas tidak selalu identik dengan kekerasan; Ekspresi Politik identitas Kiai tampil dalam bentuk "lembut" baik ketika dalam kondisi penuh "tekanan" oleh penguasa maupun ketika dalam kondisi "bebas" karena menjadi penguasa. Politik identitas tidak selalu datang dari minoritas; Politik identitas tidak selalu identik dengan kekerasan; Ekspresi Politik identitas Kiai tampil dalam bentuk "lembut" baik ketika dalam kondisi penuh "tekanan" oleh penguasa maupun ketika dalam kondisi "bebas" karena menjadi penguasa*

**Kata kunci:** Politik, Identitas, Kiai

**Abstract**

*There is an impression that identity politics arises from the oppressed majority of the state against other countries, the state against its own people, the community of citizens against other communities of fellow citizens, followers of certain religions with followers of other religions, and so on. This research is intended to prove*

*whether identity politics can emerge from the majority. This research was conducted through field research by observing, meeting face to face, making friends, and hanging out for years from 1995 to 2019. The results of this study prove that identity politics can emerge from the majority. Identity politics do not always come from minorities; Identity politics are not always synonymous with violence; Political expression of Kiai's identity appears in the form of "gentle" both when in a condition full of "pressure" by the ruler and when in a condition "free" for being the ruler*

**Keywords:** *Politics, Identity, Kiai*

## **A. Pendahuluan**

Ada kesan, bahwa politik identitas hanya datang dan muncul dari minoritas yang tertindas baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun agama. Minoritas yang tertindas ini bisa terjadi dan dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, oleh negara terhadap komunitas warga bangsanya, oleh komunitas warga bangsa terhadap komunitas warga bangsa lainnya, oleh komunitas agama terhadap komunitas agama lainnya, dan seterusnya.

Tulisan dalam artikel ini justru bermaksud membuktikan sebaliknya, bahwa politik identitas bisa saja datang dan muncul dari mayoritas, baik ketika sedang tertindas maupun ketika terbebas. Untuk sampai pada pembuktian bahwa politik identitas bisa saja datang dan muncul dari mayoritas, maka penulis memulai penelitian dari kasus tiga Kiai di desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Artikel ini ditulis karena beberapa pertimbangan berikut. Pertama, pembuktian bahwa politik identitas bisa saja datang dari mayoritas dan tidak selalu identik dengan minoritas; Kedua, politik identitas dalam ekspresi dan aktualisasinya tidak selalu identik dengan kekerasan; Ketiga, produk dari politik identitas tidak selalu bersifat destruktif, tetapi konstruktif dan maslahah.

## **B. Metode**

Metode yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian politik identitas kiai ini menggunakan *field research* dengan cara mengamati, bertemu muka langsung, berkawan dan bergaul bertahun-tahun. Rentang waktu penelitian cukup panjang sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 ini. Penelitian politik identitas

kiai ini sepenuhnya atas biaya mandiri. Hasil penelitian tersebut kemudian penulis laporkan dalam bentuk artikel ini.

## **A. B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Menelisik Kemunculan politik identitas**

Orang pertama yang menjelaskan hakekat politik identitas adalah L.A. Kauffman pada awal 1960-an dengan melacak asal-usul gerakan mahasiswa anti-kekerasan di Amerika Serikat yang dinekal dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Commttee), sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di AS (Socialist Review, No. 1, Vol. 20 (Jan.-March1990), 67-80). Para penggagas teori politik identitas di AS menemukan akar persoalan kemunculan politik identitas di AS, yaitu ketidakadilan melalui praktek pemerasan terhadap masyarakat kulit hitam, masyarakat berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lain oleh kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai oleh sekelompok kecil kulit putih (Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, 2010: 4).

Islamisme Radikal, sebagai bagian dari ekspresi Politik identitas, muncul karena faktor ekonomi-politik dan kekuatan ideologi-doktrin normatif (Kertas Kerja yang disampaikan dalam Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar, 2016: 9-11). Ekspresi politik identitas dapat dilihat, misalnya, melalui masyarakat yang berbahasa dan berbudaya Perancis di Quebeck yang ingin memerdekakan diri dari negara Kanada yang berbahasa Inggris, kemerdekaan bangsa-bangsa yang tergabung dalam federasi Uni Soviet, gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup Katolik di Amerika dan gerakan muslim kulit hitam juga di Amerika adalah karena faktor ketidakadilan sosial (Kertas Kerja yang disampaikan dalam Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar, 2016: 5-6). Sementara ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) adalah contoh spektakuler zaman kontemporer yang menunjukkan ekspresi Politik identitas karena faktor ekonomi-politik dan kekuatan ideologi-doktrin normatif (Reno Muhammad, 2015: 23-32).

Di Indonesia, ekspresi politik identitas bisa disaksikan pada gerakan sempalan yang dilakukan oleh kelompok militan Jama'ah Islamiyah (JI) yang berhubungan dengan al-Qaeda atau kelompok militan lain yang serupa (Abdurrahman Wahid, 2006: xxvi. Pada 28 Maret 1981 pesawat Garuda DC-9 Woyla penerbangan 206 dari Palembang tujuan Medan dibajak oleh 5 orang teroris yang mengaku sebagai anggota Komando Jihad. 21 Januari 1985 bom Candi Borobudur bermotif jihad, 1 Agustus 2000 bom Kedubes Filipina di Menteng Jakarta Pusat, 27 Agustus 2000 granat meledak di Kedubes Malaysia di Kuningan Jakarta, 13 September 2000 bom Bursa Efek Jakarta, 24 Desember 2000 bom malam Natal di beberapa kota di Indonesia, 22 Juli 2001 bom di gereja Santa Anna

JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

dan HKBP di kawasan Kalimalang Jakarta Timur, 23 September 2001 bom Plaza Atrium Pasar Senin Jakarta, 6 Nopember 2001 bom rakitan meledak di halaman Australian Intenational School (AIS) Pejaten Jakarta, 1 Januari 2002 bom Tahun Baru, granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan Jakarata, di Palu Sulawesi Tengah terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja.

Pada 12 Oktober 2002 bom Bali, terjadi tiga ledakan yang menewaskan 202 warga Australia dan 300 orang luka-luka, di Manado Sulawesi Utara bom meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban, 5 Desember 2002 bom restoran McDonald's di Makassar, 3 Pebruari 2003 bom kompleks Mabes Polri Jakarta, 27 April 2003 bom Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta, 5 Agustus 2003 bom hotel JW Marriott Jakarta, 10 Januari 2004 bom Kota Palopo Sulawesi Selatan, 9 September 2004 bom Kedubes Australia Jakarta, 12 Desember 2004 bom di gereja Immanuel Palu Sulawesi Tengah, 21 Maret 2005 dua bom meledak di kota Ambon ibukota propinsi Maluku, 28 Mei 2005 bom di kota kecil Tentena Poso Sulawesi Tengah, 8 Juni 2005 bom Pamulang Barat Tangerang meledak di halaman Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Jibril alias M. Iqbal.

1 Oktober 2005 bom Bali II, 31 Desember 2005 bom Pasar Palu Sulawesi Tengah, setelah sunyi empat tahun, 17 Juli 2009 bom meledak lagi hampir bersamaan sekitar pukul 07.50 WIB di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta, Januari 2010 terjadi penembakan warga sipil di Aceh, September 2010 perampokan di bank CIMB Niaga di Medan, 15 April 2011 bom bunuh diri di masjid Mapolresta Cirebon saat shalat jum'at, 22 April 2011 bom dengan target gereja Christ Cathedral serpong Tangerang selatan Banten. Tapi berhasil digagalkan aparat Kepolisian RI, 25 September 2011 bom bunuh diri di GBIS Kepunton Solo Jawa tengah usai kebaktian saat jemaat keluar dari gereja, 19 Agustus 2012 granat meledak di Pospam Gladak Solo Jawa tengah, 9 Juni 2013 bom meledak di depan masjid Mapolres Poso Sulawesi Tengah, dan 14 Januari 2016 terjadi ledakan bom dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat ([https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia). Diunduh 10-04-2016).

## **2. C. Politik Identitas Kiai**

Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tiga Kiai tokoh di desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo Jawa Timur sebagai berikut. Tokoh 1 inisial KH FA, umur 78 th, dalam berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa Jawa,

ketika mengkaji kitab kuning juga menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, ketika Khutbah Jum'at, menggunakan bahasa Jawa campur dengan bahasa Indonesia, ketika ceramah menggunakan bahasa Indonesia murni dan ketika mengakadnikahkan memakai bahasa Arab. Pakaian sehari-hari lebih sering memakai sarung putih, baju koko putih, dan kopyah putih. Ketika shalat lima waktu juga memakai sarung putih, baju koko putih, dan kopyah putih. Ketika menjadi khatib Jum'at dan memimpin istighatsah di masjid Pakai sarung putih, jubah putih, kopyah putih, dan surban putih. Sebagai tokoh tertua di desa Kalanganayar, tokoh ini bersama dua orang tokoh lainnya, memimpin ritual ruwat desa yang diadakan setahun sekali yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat desa Kalanganayar laki-laki dan perempuan dewasa, meski sebagaian anak-anak juga melibatkan diri. Selain itu, tokoh ini termasuk salah satu dari tiga tokoh yang menjadi imam shalat janazah dan memimpin upacara pemberangkatan mayit menuju ke peristirahatan terakhir, memimpin tahlil, doa-doa selamat maupun pernikahan dan penceramah dalam acara-acara rutin dan pernikahan. Tokoh panutannya adalah para kiai pesantren. Dan yang khas dari tokoh 1 ini adalah tegas, lugas dan sarat kepentingan hegemonistik.

Tokoh 2 inisial KH SH, umur 60 th, berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa Jawa, ketika mengkaji kitab kuning juga menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, ketika Khutbah Jum'at, menggunakan bahasa Jawa campur dengan bahasa Indonesia, ketika ceramah menggunakan bahasa Indonesia murni yang didahului dengan pembukaan berbahasa Arab yang panjang dan ketika mengakadnikahkan memakai bahasa Arab. Pakaian sehari-hari lebih sering memakai sarung warna bebas, baju biasa dan selalu berkopyah hitam. Ketika shalat lima waktu pakai sarung warna bebas, jubah warna hijau sebagai warna favorit, dan kopyah putih, dan surban warna bebas. Demikian juga pakaian yang dikenakan ketika menjadi khatib Jum'at dan memimpin istighatsah, hanya saja lebih baru. Sebagai salah satu tokoh di desa Kalanganayar, tokoh ini bersama dua orang tokoh lainnya, juga memimpin ritual ruwat desa yang diadakan setahun sekali yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat desa Kalanganayar laki-laki dan perempuan dewasa, meski sebagaian anak-anak juga melibatkan diri. Selain itu, tokoh ini termasuk salah satu dari tiga tokoh yang menjadi imam shalat janazah dan memimpin upacara pemberangkatan mayit menuju ke peristirahatan terakhir, memimpin tahlil, doa-doa selamat maupun pernikahan dan penceramah dalam acara-acara rutin dan pernikahan. Tokoh panutannya adalah para Kiai pesantren. Dan yang khas dari tokoh 2 ini adalah bersuara bariton, tegas, lugas dan kentara sifat materialistiknya.

JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

Tokoh 3 inisial KH TH, umur 55 th, berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa Jawa, ketika mengkaji kitab kuning juga menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, ketika Khutbah Jum'at, menggunakan bahasa Jawa campur dengan bahasa Indonesia, ketika ceramah menggunakan bahasa Indonesia murni dan ketika mengakadnikahkan memakai bahasa Arab. Meski sesekali menggunakan bahasa Indonesia. Pakaian sehari-hari lebih sering memakai sarung warna bebas, baju campuran ( koko, biasa, dan batik) dan selalu berkopyah hitam kadang putih. Ketika shalat lima waktu pakai sarung warna bebas, baju koko warna bebas, dan kopyah kadang putih kadang hitam, dan surban warna bebas. Demikian juga pakaian yang dikenakan ketika menjadi khatib Jum'at dan memimpin istighatsah, hanya saja Selalu Kopyah Putih. Dalam berpakaian, tokoh 3 ini tidak suka formalitas. Sebagai salah satu tokoh di desa Kalanganyar, tokoh ini bersama dua orang tokoh lainnya, juga memimpin ritual ruwat desa yang diadakan setahun sekali yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat desa Kalanganyar laki-laki dan perempuan dewasa, meski sebagaimana anak-anak juga melibatkan diri. Selain itu, tokoh ini termasuk salah satu dari tiga tokoh yang menjadi imam shalat janazah dan memimpin upacara pemberangkatan mayit menuju ke peristirahatan terakhir, memimpin tahlil, doa-doa selamat maupun pernikahan dan penceramah dalam acara-acara rutin dan pernikahan. Tokoh panutannya adalah para Kiai pesantren. Dan yang khas dari tokoh 3 ini adalah pengasuh pesantren, memiliki pengaruh lebih besar dan oportunistik.

Dari paparan hasil penelitian tiga Kiai tokoh di atas, maka penulis dapat melakukan generalisasi, bahwa seperti itulah performa Kiai di Indonesia pada umumnya yang bernaung di bawah ormas Nahdlatul Ulama (NU). Dan sebagaimana penulis telah sampaikan dalam pendahuluan tulisan ini, bahwa pokok permasalahan paper ini adalah untuk membuktikan bahwa politik identitas bisa saja datang dan muncul dari mayoritas baik dalam kondisi tertindas maupun dalam kondisi terbebas.

Dalam perspektif historis, perjalanan Kiai Indonesia (baca: NU) terbagi atas tiga masa, yaitu masa kerajaan-kerajaan Nusantara, masa kolonialisasi, dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan terbagi lagi menjadi tiga orde, yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Dan untuk kepentingan artikel ini, penulis hanya akan mengurai politik identitas Kiai pada masa pemerintahan orde baru dan pemerintahan orde reformasi. Pada masa pemerintahan orde baru untuk melihat bentuk ekspresi politik identitas Kiai dalam kondisi "tertindas", dan masa

pemerintahan orde reformasi untuk mencermati bentuk ekspresi politik identitas Kiai dalam kondisi “terbebas”. Dalam membaca bentuk ekspresi politik identitas Kiai tersebut, penulis membacanya melalui dinamika Nahdlatul Ulama (NU), karena Kiai sebagai pendiri, pemimpin organisasi, dan sebagai panutan warga nahdhiyin (Ali Maschan Musa, 2007: 106).

Pemerintahan orde baru berlangsung selama 32 tahun di bawah kepemimpinan presiden ke-2 Soeharto. Presiden Soeharto dalam menjalankan roda pemerintahannya menggunakan tekanan dan represi terhadap para pengkritiknya. Tekanan ini, misalnya dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh NU, terutama ketika masa kepemimpinan Gus Dur, KH. Abdurrahman Wahid.

Pada awal kepemimpinan Soeharto ketika diangkat sebagai pejabat presiden oleh MPRS pada 1967, dua Kiai NU masuk dalam jajaran Kabinet Ampera (11 Oktober 1976-6 Juni 1968), yaitu KH. Idham Kholid (Menkesra) dan KH. Saifuddin Zuhri (Menag). Namun Kabinet setelah ini disempurnakan posisi KH. Saifuddin Zuhri digantikan oleh KH. Moch. Dahlan (Menag) yang mewakili poros Masyumi dan PSI sampai pemilu tahun 1971 diselenggarakan (Nur Khalik Ridwan, 2010: 193-194).

Pasca pemilu 1971, presiden Soeharto dan wakil presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX membentuk Kabinet Pembangunan II periode 1973-1978. Tidak ada satupun wakil NU di dalam kabinet ini (Nur Khalik Ridwan, 2010: 211-212.). Pada 1973 pemerintah Soeharto melakukan fusi partai-partai menjadi tiga, yaitu Golkar, PPP, dan PDI dengan cara “paksa”. NU di parlemen yang dipelopori oleh Subhan, ZE mulai kritis dan berani mengkritik pemerintahan Soeharto (Nur Khalik Ridwan, 2010: 218).

Sikap kritis NU terhadap Soeharto terus berlanjut, dan Soeharto pun melakukan tekanan dan upaya untuk mengurangi kekuatan NU di PPP secara signifikan yang pada puncaknya NU kembali ke Khittah 1926 hasil keputusan Munas Alim Ulama di PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada 13-16 Rabi' al-Awwal 1404 H/18-21 Desember 1983 M. Artinya NU tidak lagi berpolitik praktis dan konsentrasi menjadi ormas (Nur Khalik Ridwan, 2010: 262-263).

Penegasan secara resmi NU kembali ke Khttah 1926 dilakukan dalam Mukhtar NU ke-27 di PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada 8-12 Desember 1984 yang dihadiri oleh presiden Soeharto (Nur Khalik Ridwan, 2010: 268). Pada Mukhtar ini juga, terpilih KH. Achmad Shiddiq sebagai Rais Am Syuriyah PBNU dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah (Nur Khalik Ridwan, 2010: 273). Sepanjang perjalanan memimpin NU, Gus Dur memainkan peran sangat penting dan strategis bagi kehidupan berbangsa dan JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

bernegara (Greg Barton, 2003: 175). Namun “sikapnya yang kritis terhadap sejumlah masalah nasional dan politik membuat kesabaran Soeharto hilang”. .... “Soeharto tidak senang dengan pendapat-pendapat Gus Dur yang menentangnya, tetapi ia juga tampaknya mengakui, bahwa dalam kebanyakan hal, Gus Dur seorang moderat dan menentang cara-cara revolusioner. Dalam pengertian ini, mereka mempunyai kehendak yang sama, yaitu menghindari konfrontasi dan keresahan sosial dan juga kebencian terhadap Islam Politik.” (Greg Barton, 2003:178-179). Pada muktamar berikutnya tahun 1989, Gus Dur terpilih kembali untuk yang kedua kalinya, walaupun terdapat tekanan luar biasa besarnya dari Soeharto (Greg Barton, 2003: 203). Demikian halnya pada Muktamar di pondok pesantren Cipasung Jawa Barat tahun 1994, intervensi dan tekanan Soeharto terhadap Gus Dur sangat luar biasa, meski pada akhirnya terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya (Greg Barton, 2003:238 dan Nur Khalik Ridwan, 2010: 305). Dan Gus Dur menyatakan, bahwa ia telah “ memenangkan pertarungan atas uang, fitnah, dan intimidasi.” (Greg Barton, 2003:258).

Mengapa Gus Dur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan sebagai representasi Kiai NU tidak mengekspresikan politik identitasnya dengan menggunakan kekerasan meskipun dalam kondisi “ditindas” oleh hegemoni Pak Harto ? Hasil penelitian sarjana Prancis tentang hubungan NU dan negara, Andree Feillard, sebagai berikut:

“Abdurrahman Wahid sendiri masih mengajak orang-orang Indonesia pada umumnya untuk mendefinisikan gambaran masyarakat ideal. Misalnya, ia menolak model yang diusulkan baik oleh Zia ul-Haq di Pakistan, Raja Fahd di Arab Saudi maupun Khomeini di Iran. Adalah sangat menarik bahwa satu-satunya model yang bisa diterimanya adalah model Indonesia tahun 1950, di mana menteri yang berasal dari partai politik Islam (misalnya Moh. Natsir) membantu pemerintah dalam posisi kunci, namun tidak pernah memaksakan ciri-ciri Islam dalam politik” (Andree Feillard, 1999, 349).

Kini tiba saatnya mencermati bentuk ekspresi politik identitas Kiai dalam kondisi “terbebas” melalui dinamika NU ketika salah seorang tokohnya, Gus Dur, menjadi presiden RI ke-4. Meski singkat, sebagaimana tercermin dalam sub judul buku biografi Gus Dur: “BULAN MADU YANG SINGKAT”, (Greg Barton, 2003: 353 dan Nur Khalik Ridwan, 2010: 359 dan 377-378) tetapi cukup bagi penulis untuk melihat ekspresi politik identitas Kiai tersebut. Selama 21 bulan Gus Dur menjadi



presiden, tidak sekalipun melakukan tindakan “kekerasan” dalam menangani para penentangannya. Yang dilakukan adalah membuka komunikasi dan dialog.

Berikut ini penulis kutipkan laporan Greg Barton dalam bukunya mengenai ekspresi politik identitas Gus Dur dan Kiai NU dalam menghadapi para penentang presiden RI ke-4 itu:

“Pada awal April 2001 terjadi perdebatan dalam NU mengenai apakah gerakan-gerakan untuk menjatuhkan seorang presiden, Gus Dur, yang terpilih secara demokratis dapat dikatakan sebagai suatu usaha makar dan oleh karena itu penggunaan kekerasan dapat dibenarkan. ..., dan oleh karena itu tidak dibenarkan menggunakan kekerasan untuk memadamkan serangan terhadap pemerintah. Pada tanggal 4 April, Gus Dur mencela pendukung-pendukung NU yang menggunakan bahasa jihad terhadap mereka yang berusaha mencopotnya. “Presiden sepenuhnya tidak setuju dengan cara-cara ekstrim yang diusulkan oleh sebagian orang untuk membelanya,” demikian kata juru bicara Gus Dur, Adhi Massardi” (Greg Barton, 2003: 442-443).

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik identitas tidak selalu datang dari minoritas;
2. Politik identitas tidak selalu identik dengan kekerasan;
3. Ekspresi Politik identitas Kiai tampil dalam bentuk “lembut” baik ketika dalam kondisi penuh “tekanan” oleh penguasa maupun ketika dalam kondisi “bebas” karena menjadi penguasa.

#### **Daftar Rujukan**

- A’la, Abd., *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia*, (Yogyakarta: LKiS, 2014).
- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Fauzi, Ihsan Ali- dan Samsu Rizal Panggabean (penyunting), *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2010).
- Feillard, Andree, *NU via-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

Hilmy, Masdar, Kertas Kerja yang disampaikan dalam Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru bidang Ilmu-ilmu Sosial pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 6 April 2016 berjudul: "Mengurai Jalan Buntu Teoritik dalam Ilmu-ilmu Sosial: Islamisme Radikal dalam Perspektif Teori Modus Produksi".

Karim, Khalil Abdul, *Kontroversi Negara Islam: Radikalisme vs Moderatisme*, (Yogyakarta: INDeS, 2015).

Kauffman, L.A., "The Anti-Politics of Identity", *Socialist Review*, No. 1, Vol. 20 (Jan.-March 1990) 1990), h. 67-80 dalam: Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Pangabean (penyunting), *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2010).

Lawrence, Bruce, *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age*, (New York: I.B. Tauris, 1990).

Muhammad, Reno, *ISIS: Mengungkap Fakta Terorisme Berlabel Islam*, (Jakarta: Nooura Books, 2015).

Musa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

Ridwan, Nur Khalik, *NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2010).

Shepard, William E., "Islam and Ideology: Towards Typology" dalam *International Journal of Middle Eastern Studies*, No. 19, 1987.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, Cet. ke-2, 2006).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia). Diunduh 10-04-2016.